

PENINGKATAN BELANJA SENJATA ARAB SAUDI KE AMERIKA SERIKAT (2013-2017)

Muhammad Bayu Noto Putra

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: phc701@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menjelaskan alasan Arab Saudi melakukan peningkatan pembelian senjata secara drastis ke Amerika Serikat. Arab Saudi sebelumnya memang telah menjalin hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, dan menjadi pengimpor senjata buatan Amerika Serikat. Namun pada tahun 2017 Arab Saudi meningkatkan pembelian senjatanya ke Amerika Serikat dikarenakan adanya peran Iran di kawasan Timur Tengah yang mengancam legitimasi Arab Saudi di wilayah tersebut. Iran dan Arab Saudi merupakan saudara serumpun yang tidak pernah akur. Permasalahan kedua negara tersebut yaitu perbedaan ideologi dalam agama Islam, Arab Saudi dengan paham Sunni merasa terancam dengan paham Syiah Iran yang mencoba memnyebar pengaruh ideologi Syiahnya di wilayah Timur Tengah. Dengan menggunakan prespektiv Realisme, konsep Balance of Power serta konsep Deterrence dari Morgenthau, Arab Saudi memiliki interpretasi tersendiri melakukan peningkatan pembelian senjata ke Amerika Serikat guna mengimbangi kekuatan militer Iran dan membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.

Keywords: Realisme, Balance of Power, Deterrence, senjata Amerika Serikat, Sunni, Syiah, Militer Iran.

Pendahuluan

Hubungan mesra Arab Saudi dan Amerika Serikat telah dijalin oleh kedua pemerintahan sejak era Raja Abdul Aziz Al Saud ditahun 1930 an lalu, dengan ditandai hubungan diplomatik antar kedua negara. Awal hubungan dilomatik keduanya dimulai dengan adanya pengakuan Amerika Serikat terhadap negara Arab Saudi yang waktu itu baru saja memberontak dari Kekhilafahan Otoman dan mendeklarasikan berdirinya Kingdom Saudi of Arabia. Pada tahun 1933 pemerintah Arab Saudi bersama dengan perusahaan Amerika Serikat mendirikan perusahaan minyak pertama di Saudi dengan nama “Aramco”, perusahaan ini kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 1988 lalu.

Berlanjut ke era presiden Aamerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, di tahun 1943, presiden Franklin D. Roosevelt mengirimkan misi militer pertama Amerika Serikat ke Arab Saudi, setelah negara adidaya tersebut menyatakan bahwa pertahanan Kerajaan merupakan hal yang vital bagi Amerika Serikat. Di tahun 1945 Presiden Franklin D. Roosevelt bertemu dengan Raja Abdul Aziz Al Saud di Terusan Suez, sebagai tanda diresmikannya hubungan Amerika Serikat-Saudi.

Memasuki era presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower pada tahun 1957, untuk pertama kalinya Gedung Putih mengumumkan awal kemitraan politik antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hubungan mesra Saudi-Amerika Serikat kembali lebih di intensifkan oleh Gedung Putih setelah sekutu mereka di Iran rezim Shah digulingkan pemerintahan Syiah Ayatollah Ruhollah Khomeini pada revolusi Iran di tahun 1979.

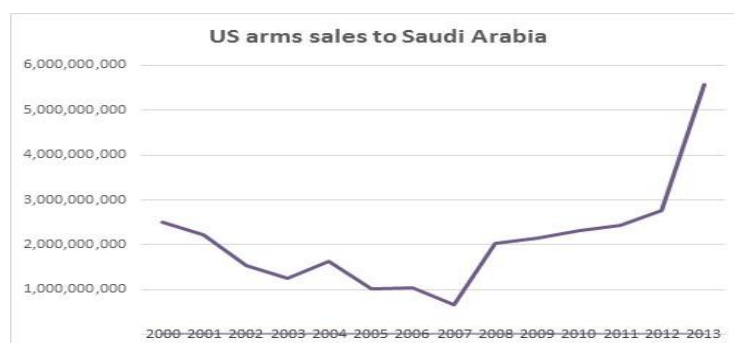
Setelah berakhirnya perang Iran-Irak pada tahun 1988, dan penurunan ancaman Soviet, hubungan Amerika Serikat-Saudi harus menghadapi ujian besar setelah adanya invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Akan tetapi justru ini meningkatkan hubungan mesra kedua negara setelah pemerintah Amerika Serikat mengirimkan 400 ribu tentaranya ke

Arab Saudi di era Presiden George W. Bush untuk membebaskan Kuwait. Sejak saat itu sampai peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat mempertahankan kemitraannya dengan Arab Saudi demi mengamankan aliran minyak yang menjadi tulang punggung politik Amerika (zahid, 2015).

Seiring dengan ditemukannya ladang minyak di Arab Saudi, Amerika mendapat hadiah besar dari Arab Saudi dengan memberinya hak pengelolaan ladang minyak tersebut dalam masa 60 tahun.

Amerika Serikat telah menjadi pemasok utama untuk sebagian besar kebutuhan militer Saudi, mulai dari jet tempur F-15 hingga sistem komando dan kontrol yang bernilai puluhan miliar dolar. Menurut data dari The Stockholm International Peace Research Institute, dari tahun 2011-2015, Amerika Serikat merupakan pemasok sepertiga dari ekspor senjata global. Penjualan senjata Amerika Serikat ke negara-negara lain mencapai nilai 66,3 miliar dolar, memberikan Amerika pangsa pasar hampir 80 persen.

Gambar 1.1 (Staff, 2015)



Berdasarkan data diatas yang bersumber dari Berita harian Midle East News menunjukkan bahwa pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi mengalami

peningkatan secara drastis sejak tahun 2012–2013. Impor senjata Arab Saudi tumbuh sebesar 54 persen dari tahun 2012 sampai 2013, dan para ahli mengatakan permintaan akan persenjataan di Arab Saudi akan terus bertambah (Staff, 2015, hal. 1).

Selama beberapa tahun Arab Saudi berada pada posisi teratas pengimpor senjata dari Amerika Serikat. Dari data penjualan senjata Amerika Serikat, selama tahun 2016 Arab Saudi berada pada peringkat pertama dengan nilai pembelian mencapai \$ 1.908 juta. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 13.000,00. Angka itu setara dengan Rp 24,8 triliun (Kamil, 2017, hal. 1).

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan pembelian senjata secara drastis oleh Arab Saudi, kesepakatan militer ini senilai \$ 110 miliar telah ditandatangani antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Ini merupakan salah satu "kesepakatan senjata tunggal terbesar" dalam sejarah Arab Saudi dan Amerika Serikat (bangsa, 2017, hal. 1). Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah berkuasa di Gedung Putih. kunjungan pertama Presiden Trump ke Riyadh telah memastikan transaksi penjualan senjata antara Amerika Serikat dan Arab Saudi tersebut. Menantu Trump, sekaligus penasihat senior Gedung Putih pun turut andil dalam negosiasi kesepakatan penjualan senjata tersebut. Ia dilaporkan telah menghubungi CEO kontraktor pertahanan, Lockheed Martin, dan memintanya untuk menurunkan harga sistem deteksi rudal yang dijual ke Arab Saudi.

Penjualan langsung senjata senilai 110 milyar dolar kepada Arab Saudi tersebut meliputi Tangki Abrams, kapal tempur, sistem pertahanan rudal, radar, dan teknologi keamanan siber dan komunikasi. Riyadh diperkirakan akan menggunakan sebagian senjata tersebut dalam intervensi militernya di Yaman, tempat koalisi Saudi melakukan kejahatan-kejahatan perang. HAM sudah memperingatkan bahwa kesepakatan jual beli senjata itu akan membuat Amerika Serikat terlibat dalam intervensi militer yang dilakukan Saudi atas Yaman.

Arab Saudi juga melakukan kesepakatan bisnis senilai 55 milyar dolar dengan berbagai perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi dan kimia (Fadel, 2017).

Selain itu, Donald Trump dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi saat kunjungannya ke Amerika Serikat pada (Kamis, 22/3) menunjukkan gambar grafik besar kepada para wartawan yang berisikan bagan penjualan senjata militer kepada Arab Saudi. Trump menyinggung daftar belanja senjata oleh Arab Saudi dan jumlah lapangan kerja yang dibuka menyusul penjualan senjata tersebut dan meminta Arab Saudi membagi kekayaan negaranya dengan membeli senjata dari Amerika.

Arab Saudi sendiri berkeinginan melepaskan 5 persen sahamnya di perusahaan Aramco pada 2019. Langkah ini bisa membuat Aramco meraup dana segar sebesar 100 miliar dollar Amerika Serikat. Ini angka tertinggi yang pernah dibukukan pasar bursa dunia. Sebelumnya, Trump menyinggung kunjungannya ke Arab Saudi tahun lalu berhasil meraih ratusan miliar dolar dalam bentuk pembelian senjata dan investasi Arab Saudi di Amerika (Today, Kunjungan Putera Mahkota Saudi dan Penjualan Senjata AS, 2018).

Prespektif Realisme

Teori Realisme yang disebut-sebut sebagai teori pertama dalam ilmu hubungan internasional pada dasarnya didasarkan pada anggapan bahwa hubungan internasional bersifat Anarki, konflik antar negara pasti terjadi sebagai manifestasi dari sifat dasar manusia yang selalu tidak pernah puas. Realis memandang sifat dasar manusia pada dasarnya buruk, dan hal tersebut tidak dapat diubah. Konflik yang terjadi antar negara itu kemudian memaksa negara lemah tunduk pada negara kuat. Konsep inilah yang kemudian mendorong munculnya istilah “keadilan adalah hak bagi mereka yang lebih kuat” (Jackson dan Sorensen, 2005, p. 88).

Realisme mulai mengemuka pasca Perang Dunia II, meski ide-ide dasarnya telah dimulai jauh sebelumnya. Asumsi-asumsi dasar kaum realis menurut Jackson dan Sorensen yaitu: (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konflikual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan politik domestik. Secara umum, kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada dalam sistem anarki internasional. Sistem anarki tersebut adalah suatu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan di atas negara dan negara memegang kedaulatan mutlak. Realisme berpandangan bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan. Selain itu realisme juga lebih memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini disebabkan karena realisme merupakan suatu pandangan pada politik internasional yang berfokus pada sifat *competitive* dan *conflictual*.

Dasar normatif realisme yaitu keamanan (*security*) dan kelangsungan hidup negara (*survival*) (Dunne & Schmidt, 2001, pp. 141-161), kedua hal tersebut merupakan esensi penting bagi terbentuknya suatu negara. Suatu negara akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara tersebut. *Survival* sebuah negara juga penting dalam menjaga kelangsungan hidup negara tersebut dalam memperoleh kepentingannya (*national interest*). Negara merupakan aktor utama dan memiliki peran paling penting dalam hubungan internasional. Kaum realis bukan tidak menganggap akan adanya aktor non-negara, hanya saja aktor non-negara tidak diakui. Fokus dari kaum realis yaitu *struggle for power*, hal ini dipertegas dengan tindakan dari setiap negara yang selalu memperhitungkan *cost and benefit* atas setiap tindakan yang dilakukannya.

Dalam perspektif realisme, moralitas mendapatkan tempat yang terbatas dalam politik internasional. Moralitas mendapatkan tempat yang terbatas karena moralitas dapat menghambat usaha suatu negara dalam memperoleh kekuatannya dari negara lain dan mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Perspektif realisme juga berpandangan bahwa politik internasional lebih penting dibandingkan politik dalam negeri. Sebab politik internasional memiliki kaitan erat dengan keutuhan kedaulatan suatu negara. Politik dalam negeri baru akan menjadi penting apabila politik tersebut dapat mempengaruhi sistem internasional (Dunne & Schmidt, 2001).

Konsep Balance Of Power

Bagi kaum realis, perdamaian dunia akan dapat diperoleh dengan dibentuknya *balance of power*. *Balance of power* atau perimbangan kekuatan merupakan sebuah konsep dimana setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ataupun menyamakan kekuatannya dengan negara lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya negara yang memiliki kekuatan berlebih atau lebih dominan dibandingkan dengan negara lain. Kaum realis selalu merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga negara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya (Akbar, 2014).

Morgenthau juga menjelaskan bahwa inti dari pandangan realis terletak pada signifikansi kepentingan nasional (*national interest*), kekuasaan (*power*), pemerataan kekuasaan (*balance of power*), dan pengaturan kekuasaan dalam dunia anarki. *Balance of power* adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Kontrol yang terjadi berupa distribusi kekuatan negara pesaing ataupun aliansi. *Balance of power* memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara yang dominan meningkatkan kekuatannya secara lebih agresif, maka negara-negara kecil yang merasa terancam akan merespon dengan beraliansi dengan negara besar untuk menjaga keamanan negara mereka dari ancaman yang

mungkin ditimbulkan oleh negara yang dominan. Sebagai contoh seperti saat Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara yang berkuasa saat itu terus menyeimbangkan kekuatan mereka dengan meningkatkan kapabilitas militer dan juga membentuk aliansi-aliansi dengan negara-negara lain. *Balance of power* dimaksudkan dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam struktur internasional. Keteraturan itu dapat terwujud dikarenakan adanya security dilemma yang membuat negara-negara lebih terfokus pada peningkatan kekuatan militer yang mereka miliki sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang negara lain dan akhirnya yang terjadi adalah *balance of power*. Keteraturan dapat terwujud salah satunya tergantung pada efektifitas *balance of power* itu sendiri. *Balance of power* berfungsi efektif jika pertama, sekelompok negara dapat membentuk perseimbangan kekuatan dalam sebuah aliansi. Di dalam aliansi tersebut negara-negara pasti lebih merasa aman dan juga lebih tahu kekuatan masing-masing negara dalam aliansi tersebut. Dalam keadaan yang demikian, proses perseimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar negara yang beraliansi, sebagai contoh banyak dibuatnya kelompok pertahan dunia. Kedua, dua negara yang berbeda dapat saling melakukan perimbangan kekuatan dengan cara menyesuaikan kekuatan militer masing-masing antara yang satu dengan yang lain.

Pemikiran Morgenthau bersumber pada pemikiran bahwa negara merupakan aktor yang sangat esensial perannya, dan bahwa para pengambil keputusan dalam negara bertindak dengan dan atas nama kepentingan nasional untuk memperoleh dan meningkatkan power yang dimilikinya. Morgenthau juga mengatakan bahwa politik dipandang sebagai usaha untuk memperjuangkan kekuasaan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997, p. 71).

Konsep Deterrence

Dalam keadaan dunia internasional yang anarki, maka untuk menciptakan perdamaian diperlukan suatu keadaan dimana setiap negara harus memiliki kekuatan yang setara (*balance of power*). Menurut paradigma ini, jika negara itu kuat maka ia cenderung akan ‘menghabisi’

negara yang lemah. Disinilah kemudian letak penting teori *deterrence* demi mewujudkan perdamaian dalam asumsi paradigma realis.

Teori *deterrence* berkembang luas di kalangan ilmuwan hubungan internasional dan diterapkan dalam kebijakan-kebijakan militer terutama pada masa Perang Dingin (*Cold War*). Tak pelak, asumsi dan konsep-konsep dalam teori *deterrence* begitu mempengaruhi para pembuat kebijakan sehingga memicu terjadinya perlombaan persenjataan antara negara-negara yang berkonfrontasi secara ideologis (komunis vs kapitalis). Setiap kali suatu negara meningkatkan kapasitas militernya, maka negara lain yang berbeda ideologis akan merasa terancam karena tidak mempunyai kekuatan penangkal lagi sehingga iapun akan memperbesar pengeluaran negaranya untuk keperluan belanja militer. Demikian seterusnya hingga terciptalah lingkaran setan yang tak berkesudahan.

Pengaruh teori *deterrence* pasca Perang Dingin sekarang ini meskipun tidak sebesar masa lalu, namun dalam kaca mata berpikir militer masih dianggap merupakan strategi ampuh yang paling masuk akal. Dalam kenyataannya, meski berbagai pertemuan internasional digelar dan banyak konvensi telah dihasilkan seputar pembatasan penggunaan senjata tertentu (seperti ranjau darat, bom biologis, senjata pemusnah massal) dan perlucutan persenjataan (*disarmament*), namun pembangunan sistem rudal antar benua (*intercontinental missiles*) misalnya masih terus saja dilakukan.

Doktrin utama teori *deterrence* bergantung kepada kemampuan sebuah negara untuk melakukan '*second strike*' meski ia telah mendapat serangan masif '*first strike*' dari musuhnya. Asumsinya adalah bahwa musuh tersebut akan mencegah serangannya (serangan dapat ditangkal) karena jika mereka menghancurkan kita, maka pada gilirannya nanti mereka pun akan hancur juga oleh kita. Teori *deterrence* seperti ini telah menjadi asumsi utama kebijakan strategis selama empat dekade Perang Dingin. Meski demikian, situasi sebenarnya yang dihasilkan dalam teori *deterrence* masih sangat *debatable*. Kesuksesan akan berjalannya

asumsi-asumsi dalam teori *deterrence* diukur dengan tidak adanya sesuatu yang terjadi serta tercegahnya aksi militer dalam bentuk perang. Namun karena tidak adanya sesuatu yang terjadi itulah maka kita tidak akan bisa yakin sepenuhnya bahwa keadaan demikian tercipta karena berjalannya teori *deterrence* ataukah karena faktor lain yang mencegah terjadinya perang (Rourke, 1988).

Terdapat dua aspek yang menjadikan teori *deterrence* berjalan dengan baik, yakni kapabilitas dan kredibilitas. Kapabilitas berarti untuk mewujudkan *deterrence* yang efektif maka sebuah negara harus memiliki kapasitas untuk dapat merespon pasca serangan yang dilakukan pihak musuh kepadanya. Dalam hal ini isu yang mengemuka bukanlah pada seberapa banyak manusia yang bisa terbunuh oleh sebuah senjata, namun lebih kepada berapa banyak senjata musuh yang masih tersisa setelah mereka diserang. Jika kemudian sebuah negara meningkatkan jumlah persenjataan demi keamanan negaranya, maka hal ini akan diikuti oleh negara lain untuk juga menambah persenjataan mereka dengan alasan demi memastikan kemampuan mereka untuk dapat melakukan serangan balasan (*retaliationary second strike*) manakala mereka diserang negara tersebut. Pada akhirnya, perilaku negara tadi akan menekan negara pertama untuk menambah persenjataan pula sehingga terciptalah perlombaan persenjataan (*the arms spiral*).

Adapun kredibilitas berarti keyakinan pihak musuh bahwa kita benar-benar akan menggunakan persenjataan yang kita miliki. Dengan demikian, persepsi adalah faktor kunci. Banyak kalangan berpendapat bahwa penghentian aktivitas pembuatan nuklir, pergerakan dan persebarannya selama Perang Dingin membuat Uni Soviet berpikir bahwa Barat tidak memiliki keinginan sama sekali untuk merespon jika terjadi serangan meskipun kapabilitasnya belum dihancurkan. Dalam teori *deterrence*, persepsi demikian bisa lebih berbahaya dibanding dengan situasi perlombaan persenjataan.

Dua aspek tersebut diyakini telah membuat teori *deterrence* berjalan dengan baik dan menghindarkan terjadinya Perang Dunia di masa Perang Dingin. Ide dasarnya adalah masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk tetap memiliki senjata setelah diserang serta masing-masing pihak memiliki keinginan untuk merespon dan melakukan pembalasan setimpal sehingga pihak lawan akan tercegah untuk melakukan serangan terlebih dahulu. (Rourke, 1988)

Dalam Kasus pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi, peningkatan pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi merupakan hasil dari proses politik internasional Arab Saudi. Arab Saudi beranggapan bahwa dunia itu anarkis, oleh sebab itu Arab Saudi meningkatkan pembelian senjata kepada Amerika Serikat. Dalam hal ini Arab Saudi menganut paham *Balance of Power* guna menyetarakan kekuatan dengan Iran serta mendapatkan kekuatan penangkal (*Deterrence of Power*) terhadap militer Iran. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki kepentingan untuk menjaga wilayahnya dari kemungkinan serangan militer yang dilakukan oleh Iran.

ALASAN PENINGKATAN PEMBELIAN SENJATA ARAB SAUDI KE AMERIKA SERIKAT

Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara dengan kekuatan politik yang cukup berpengaruh dalam kancah politik Timur Tengah. Kedua negara ini mempunyai modal politik untuk mempengaruhi keadaan politik di kawasan kilang minyak tersebut. Namun demikian kedua negara ini memiliki hubungan yang tidak harmonis, terutama setelah meledaknya Revolusi Iran pada tahun 1979, sampai pada hari ini. Iran adalah negara dengan mayoritas Syiah (89%) sementara Saudi mayoritas penduduknya Sunni (95%). Ketidakharmisan hubungan kedua negara tersebut tidak terlepas dari aliran keagamaan dalam Islam.

Perseteruan kedua negara tersebut semakin terlihat setelah *The Arab Spring* berkejolak tahun 2011 lalu. Iran dan Saudi mengambil sikap yang berbeda dalam merespons peristiwa politik setelah tahun 2011 lalu, bahkan keduanya memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dalam gejolak politik Suriah yang masih berlangsung hingga sampai saat ini, Iran mengambil sikap memberikan dukungan politik penuh bagi Rezim Bashar al-Assad. Sikap politik Iran dengan dukungannya untuk Rezim Assad ini karena Suriah telah menjadi salah satu mitra koalisi politik Iran di Timur Tengah sejak revolusi Iran 1979. Oleh karena itu Iran mempunyai kepentingan politik untuk menjaga dan mempertahankan mitra politiknya, terlebih Assad adalah pemimpin dari kalangan Syiah.

Sebaliknya Saudi memberi dukungan bagi kelompok oposisi di Suriah yang bermaksud menggulingkan Assad dari kursi kepresidenan di Suriah. Target Saudi adalah menggulingkan pemimpin dari kelompok Syiah tersebut dan kemudian menggantinya dengan pemimpin dari aliran Sunni, mengingat Suriah adalah negara dengan mayoritas penduduk beraliran Sunni tetapi dipimpin oleh Assad yang menganut paham Syiah.

Harus dicatat bahwa Saudi termasuk negara yang sangat keras mengecam aliran Syiah, sebagai aliran yang dianggap menyimpang dari Islam. Dalam kasus Suriah, Saudi bekerjasama dengan Amerika Serikat dan memeralat Liga Arab untuk mengisolasi Bashar al-Assad dari kancah politik dunia Arab. (Sahide, Gejolak Politik Timur tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan), 2017, hal. 162-163)

A. PENINGKATAN KEKUATAN MILITER IRAN

1. Pengembangan Nuklir Iran sejak tahun 1979

Iran sebenarnya sudah mulai mengembangkan kekuatan nuklirnya sebelum Revolusi Islam Iran meledak tahun 1979. Pada era Shah Reza Pahlevi, yang mendapatkan dukungan barat, Iran sudah mulai mengembangkan kekuatan militernya, termasuk senjata nuklir,

persisnya sejak tahun 1960-an. Instalasi nuklir Iran pertama adalah untuk penelitian dengan kekuatan hanya 5 Megawatt yang diperolehnya dari Amerika Serikat lantas kemudian mulai beroperasi pada tahun 1967. Betapa pun tercatat dalam dokumentasi sejarah Iran pernah bekerjasama dengan Jerman, perancis untuk mendirikan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi setelah Rezim Shah Pahlevi berakhir, proyek pengembangan nuklir tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh Amerika, Jerman dan Perancis. Namun Iran tetap bersikukuh mengembangkan megaprojek tersebut (Rahman, 2003, hal. 203-204).

Pergantian Rezim pada tahun 1979, dalam revolusi, membuat proyek perkembangan nuklir Iran tidak berjalan mulus. Barat tidak lagi melihatnya sebagai proyek yang menguntungkan, akan tetapi upaya pembangunan nuklir Iran sudah dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas politik di kawasan Timur Tengah yang harus dihentikan. Maka, Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Israel (Mossad) mulai memata-matai dan menyuplai informasi pada media masa barat dan Israel bahwa Iran memang serius terhadap proyek nuklir. CIA dan Mossad menuduh Iran membangun reaktor nuklir berskala kecil dengan kekuatan masing-masing 20 hingga 30 Megawatt. Dengan latar belakang itulah, di balik Iran terus berupaya mendekati Cina, Pakistan, dan negara Asia Tengah dalam upaya membangun laboratorium nuklir berskala kecil untuk kebutuhan riset ilmiah. Pada tanggal 30 Oktober 1991, Iran disinyalir membeli bahan dari Cina yang bisa memproduksi Uranium. Dalam kasus lain, AS juga mencemaskan penandatanganan hubungan ekonomi Iran - Rusia pada tahun 1991, yang menyebutkan Rusia akan membantu pembangunan 2 reaktor nuklir yang masing-masing memiliki daya 440 Megawatt (Rahman, 2003, hal. 205).

Amerika yang tidak lagi sejalan dengan Iran secara gradual melakukan berbagai opsional untuk mencekal pembangunan nuklir Iran tersebut. Presiden AS Bill Clinton pada tahun 1995 menambah sanksi dengan mengembargo ekonomi total atas Iran dan kemudian mengeluarkan Undang-Undang D'Amato yang isinya melarang perusahaan-perusahaan

asing menanamkan modalnya pada sektor perminyakan Iran lebih dari US\$ 40 juta pertahun. Namun sanksi ini tidak dipatuhi, bahkan oleh sekutu Amerika sendiri seperti Inggris dan Perancis yang memiliki investasi besar di bidang energi Iran (El-Gogary, 2006, hal. 324) .

Pengembangan nuklir Iran menjadi bagian dari ‘krisis politik’ di kawasan Timur Tengah dan dunia pada umumnya setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979 dimana Iran tidak lagi sejalan dengan Amerika dan sekutunya di kawasan Timur Tengah tersebut. Krisis ini semakin memanas setelah Ahmadinejad terpilih sebagai pemimpin politik negeri Mullah tersebut. Pendahulu Ahmadinejad, Mohammad Khatami sempat menghentikan proses pengayaan Uranium (2003-2005) secara sukarela untuk membuka jalan bagi negosiasi dengan Uni Eropa, yang diwakili Perancis, Inggris dan Jerman.

Suhu politik kembali memanas setelah Ahmadinejad terpilih sebagai presiden Iran. Ahmadinejad dikenal sebagai tokoh beraliran garis keras, langsung melaksanakan program pengayaan Uranium untuk penyediaan energi di Iran. Hal ini langsung mendapatkan respons dari dunia Internasional, dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Juga badan dunia seperti PBB mengeluarkan seruan agar Ahmadinejad menghentikan program nuklir tersebut. Alasan penolakan tersebut adanya kemungkinan Iran akan menciptakan senjata pemusnah massal (Khan, 2007, hal. 324).

Tuduhan ini sebenarnya sudah seringkali dijawab dengan tegas oleh pihak Iran bahwa program pengayaan Uraniumnya bertujuan damai, untuk energi listrik, bukan untuk pembuatan senjata pemusnah massal seperti yang diwacanakan oleh pihak barat dan sekutunya. Namun pihak barat, terutama Amerika dan sekutunya Israel tetap berkeyakinan bahwa program tersebut bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang berwenang mengawasi program nuklir di sebuah negara dan terus melakukan inspeksi terhadap situs-situs nuklir Iran, menyatakan tidak ada

indikasi Iran sedang melakukan kegiatan nuklir untuk keperluan pembuatan senjata (El-Gogary, 2006, hal. 314).

Amerika yang menganggap bahwa program nuklir Iran merupakan suatu bahaya yang tidak dapat diterima menggunakan berbagai macam cara untuk menjinakkan upaya Iran tersebut. Lembaga internasional, seperti PBB pun dijadikan kendaraan politik oleh Amerika untuk menekan Iran. Oleh karena itu Ahmadinejad sudah sering mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB (El-Gogary, 2006, hal. 313).

Sanksi ini tidak membuat Iran gentar dan berubah sikap. Iran menyadari betul skenario AS itu dengan tujuan bergeming dari pendiriannya. Baginya, bila ia tunduk pada tekanan AS yang menghentikan aktifitas nuklirnya, maka akan ada alasan melemahkan Iran tanpa perlu melakukan serangan militer.

2. Peningkatan Kekuatan Militer Iran di Tahun 2017

Iran yang mendefinisikan doktrin militernya sebagai kekuatan defensif, sepenuhnya independen di bidang ini. Seluruh dimensi kemampuan pertahanan Iran mulai dari senjata ringan hingga senjata strategis seperti rudal dan sistem pertahanan udara, memainkan peran defensif dan tidak dirancang untuk agresi. Tujuan final kekuatan pertahanan dan militer adalah menjaga integritas teritorial dan independensi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Republik Islam Iran sudah berhasil melakukannya. Kemajuan berkelanjutan Iran dalam proses diversifikasi kekuatan pencegahan, adalah prioritas agenda kerja institusi militer yang harus didukung pemerintah. Di antara elemen Angkatan Bersenjata Iran, Tentara Nasional Iran memainkan peran signifikan dan disempurnakan oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, Pasdaran.

Awal tahun 2017, Presiden Hassan Rouhani mengunjungi Perusahaan Renovasi dan Logistik Helikopter Iran, PANHA dan meresmikan pesawat tempur latihan pertama buatan

dalam negeri Iran, Kowsar, pesawat tanpa awak taktis pengintaian yang dilengkapi senjata, Mohajer-6, rudal jelajah anti-kapal, Nasir dan rudal udara ke udara, Fakour. Pesawat tempur latih pertama buatan dalam negeri Iran, Kowsar dirancang dan dibuat oleh para ilmuwan Pusat Penelitian Lembaga Industri Udara, Kementerian Pertahanan Iran dengan memanfaatkan kapasitas perusahaan-perusahaan berbasis ilmu pengetahuan dalam negeri. Pesawat yang diproduksi atas pesanan dan dengan partisipasi Angkatan Udara Tentara Nasional Iran ini, sepenuhnya dalam negeri dan selain bisa digunakan untuk melatih para calon pilot, pesawat ini juga mampu melaksanakan tugas-tugas dukungan dekat di udara dan mengangkut berbagai jenis senjata. Ide, desain, produksi, uji coba dan penyesuaian standar pesawat Kowsar, menjadikan Iran masuk dalam satu dari segelintir negara dunia yang memiliki kemampuan merancang dan memproduksi pesawat di kelas ini. Perancangan, sampling dan uji coba peluncuran rudal jelajah anti-kapal, Nasir juga masuk dalam kerangka upaya penguatan kemampuan rudal Angkatan Bersenjata Iran. Rudal darat ke darat ini bisa diluncurkan dari pesisir pantai ke laut untuk menembak target, termasuk kapal perang dan dermaga.

Selain itu, rudal udara ke udara, Fakour yang bisa dipasang di pesawat tempur, mampu menghadapi berbagai jenis ancaman udara dan merupakan rudal udara ke udara pertama Iran. Pada 22 Januari 2017, rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 juga dipamerkan. Rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 memiliki banyak kegunaan dalam perang elektronik dan memungkinkan dipakai untuk menyerang target-target dengan lokasi *cross-section* rendah.

Brigjen Farzad Esmaili, Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya Saw mengatakan, teknologi yang digunakan untuk membuat rudal anti-pesawat jarak jauh, Sayyad-3 hanya dimiliki sejumlah kecil negara. Namun para pakar Iran berhasil merancang dan memproduksi rudal ini di masa sanksi dengan bersandar pada kemampuan dalam negeri.

Di hari pertama Pekan Pertahanan Suci, digelar parade militer Angkatan Bersenjata Iran di halaman kompleks Makam Imam Khomeini, Tehran dan dalam acara itu beberapa prestasi militer Iran turut dipamerkan. Rudal Zolfagar, rudal balistik Khorramshahr, Qiam, Emad dan Sejil, termasuk di antara produk Angkatan Udara Pasdaran yang diluncurkan secara resmi pada 22 Desember 2017. Puncak kekuatan rudal Iran, adalah sistem rudal balistik Khorramshahr yang untuk pertama kalinya dipamerkan dalam parade militer Angkatan Bersenjata Iran di Tehran. Rudal Iran adalah simbol kekuatan Iran yang dipamerkan di tahun 2017 dalam berbagai metode.

Kekuatan rudal pencegahan, adalah bukti kekuatan nyata Iran di Timur Tengah. Serangan rudal Pasdaran Iran ke markas teroris di Deir Ezzor, Suriah, Juni 2017, membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Iran adalah negara yang kuat di bidang rudal. Serangan rudal lintas perbatasan pertama Iran ini adalah jawaban tegas atas musuh (Today, Pars today, 2018, hal. 1).

Berikut ini adalah data yang diambil dari situs Global Fire Power mengenai kekuatan militer Iran pada tahun 2017:

1. Angkatan Udara. Dengan total kekuatan pesawat 477 unit, pesawat tempur 137 unit, pesawat penyerang 137 unit, pesawat transportasi 203 unit, pesawat pelatih 79 unit, total kekuatan helikopter 126 unit, helikopter serang 12 unit.
2. Angkatan Darat. Tank tempur 1.616 unit, kendaraan petarung lapis baja 1.315 unit, artileri 2.398 unit, proyektor roket 1.474 unit.
3. Angkatan Laut. Total aset angkatan laut 398 unit, Frigat 5 unit, korvet 3 unit, kapal selam 33 unit, kapal patroli 230 unit, kapal perang 10 unit.

(Power, 2017, hal. 1)

PERBANDINGAN KEKUATAN MILITER ARAB SAUDI DAN IRAN

Belum tercatat dalam sejarah Arab Saudi terlibat perang sesungguhnya dengan Iran. Meskipun begitu keduanya tak dipungkiri terlibat dalam perang proxy di sejumlah negara, termasuk di dalam negeri masing-masing. Berikut ini adalah perbandingan kekuatan militer kedua negara:

1. Kekuatan Pasukan

Populasi Iran hampir tiga kali dari Arab Saudi. Dari sini Iran jelas memiliki kelebihan dalam jumlah sumber daya manusia.

Menurut pengamat militer GlobalFirepower.com, Iran memiliki kekuatan militer 934.000 personil dengan 534.000 personel aktif dan 400.000 cadangan. Sementara Arab Saudi memiliki 256.000 personil dengan 231.000 personel aktif dan 25.000 cadangan. Situs analisis itu mengatakan bahwa terdapat kurang dari 40 juta warga sipil yang bisa dilatih dan dilibatkan jika perang pecah. Sedangkan Arab Saudi memiliki 14 juta orang untuk dipilih dalam keadaan darurat militer.

2. Pesawat Terbang

Meskipun memiliki personel militer lebih kecil, Angkatan Udara Arab Saudi lebih tinggi daripada Iran. Arab Saudi memiliki 790 pesawat terbang, dari jet tempur, pesawat pengangkut dan helikopter militer.

Sementara itu Iran hanya memiliki 477 pesawat terbang, dengan jumlah pesawat pengangkut yang besar. Tidak seperti Arab Saudi yang memiliki lebih banyak pesawat tempur daripada jenis pesawat lainnya.

3. Kendaraan Militer

Arab Saudi memiliki jumlah kendaraan militer yang lebih kecil dari Iran. Arab Saudi memiliki 1.142 tank tempur dan hampir 5.500 kendaraan tempur lapis baja. Sedangkan Iran

memiliki lebih banyak tank, dengan jumlah 1.161 armada, tapi hanya 1.315 kendaraan tempur.

4. Artileri

Kontes perang modern tidak banyak di medan pertempuran, sebaliknya berada di ruang kontrol dengan jarak ratusan ribu mil. Dalam hal ini Iran benar-benar melenturkan kekuatan militernya, dengan memiliki 1.474 proyektor roket dan hampir 2.500 jenis artileri. Sedangkan Arab Saudi hanya 322 proyektor roket dan kurang dari 1.000 jenis artileri.

5. Angkatan Laut

Kedua negara tidak saling berbatasan tapi berhadapan satu sama lain di Teluk Persia. Dari sini, kekuatan angkatan laut dua negara merupakan faktor kunci yang harus dipertimbangkan jika terjadi perang habis-habisan. GlobalFirepower.com memperkirakan total angkatan laut Iran adalah 398 aset, yang sebagian besar terdiri dari kapal patroli. Sementara angkatan laut Arab Saudi hanya 55 aset.

6. Anggaran Militer

Anggaran militer Arab Saudi lebih besar dari Iran dengan nominal \$ 56.725.000.000 dibandingkan dengan \$ 6.300.000.000. Anggaran besar karena Arab Saudi membutuhkan pemeliharaan perangkat militer yang jumlahnya lebih banyak daripada Iran (Fuadi, 2017, hal. 1).

Dapat dilihat dari perbandingan yang dikutip dari GlobalFirePowr.Com bahwa Iran lebih unggul daripada Arab Saudi. Oleh karena itu Arab Saudi yang notabennya merupakan saingan dari Iran di kawasan Timur Tengah mencoba untuk meningkatkan militernya yang direalisasikan dengan cara menggunakan anggaran militernya untuk belanja senjata kepada Amerika Serikat yang sudah menjadi kolega serta produsen dari perlengkapan militer Arab Saudi.

USAHA ARAB SAUDI MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arab Saudi dan Iran memang merupakan saudara yang tak pernah akur, hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan diantara mereka. Arab Saudi dengan paham Sunni nya sedangkan Iran yang menganut paham Syiah. Memang isu keagamaan tersebutlah yang menjadi akar dari permusuhan kedua negara tersebut. Dalam banyak hal perseteruan ini setara dengan Perang Dingin, yang membuat AS dan Uni Soviet bersitegang selama bertahun-tahun. Iran dan Arab Saudi tidak bertempur secara langsung namun mereka terlibat dalam berbagai 'perang proksi' di seluruh wilayah tersebut.

1. Iran di Timur Tengah

Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 merupakan salah satu hal yang tidak terduga di tengah terjadinya berbagai konflik di Timur Tengah. Salah satu perkembangan yang paling penting dalam abad ke-21 ini di Timur Tengah adalah tampilnya Iran sebagai salah satu kekuatan regional. Ini bukan hanya semata-mata karena Iran adalah sebuah pemerintah Islam atau karena mampu mengembangkan nuklir, tetapi juga faktor lainnya, baik itu secara geopolitik maupun kedekatan emosional dan kedekatan politis dengan negara-negara di Timur Tengah.

Iran yang saat ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad memiliki pandangan tersendiri dalam membaca kondisi Dunia Arab. Kemampuan Iran dalam menunjukkan identitas pun harus diakui cukup hebat

Tidak bisa dipungkiri, Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad kini menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Belum lagi, kemampuan nuklir Iran yang membuat negara-negara Barat tidak bisa meremehkan. Keberhasilan politik luar negeri Iran dalam dua tahun pertama masa pemerintahan Ahmadinejad dapat ditelusuri di kawasan Timur Tengah. Sistem diplomasi Republik Islam Iran dengan memanfaatkan seluruh

kemampuan yang dimiliki berhasil dalam aksi-aksinya di Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon dan juga Amerika Latin. Kemampuan diplomasi pemerintah Ahmadinejad mengubah Revolusi Islam Iran menjadikan salah satu negara terkuat di Timur Tengah (wibowo, 2011, hal. 1).

Selain itu, Iran juga selalu mengupayakan persatuan dan pengikisan hegemoni Barat atas dunia Islam, serta perlawanan terhadap agresi dan propaganda Barat terhadap umat Islam. Dalam hal ini, dukungan Iran untuk Palestina memiliki posisi istimewa dan mendapat perhatian luas opini publik. Dukungan tersebut membuat masyarakat Palestina menilai Iran sebagai pendukung utama Palestina dan hal ini memperkuat hubungan persaudaraan antara rakyat Palestina dan Iran.

Rakyat Palestina dengan bangga menyinggung hubungan dengan Iran dan peran efektif Republik Islam dalam perimbangan regional serta bantuannya bagi bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sikap dan kebijakan konstruktif Iran terkait krisis Suriah juga diapresiasi oleh rakyat dan pemerintah Suriah serta para tokoh internasional, termasuk Utusan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, Staffan de Mistura, utusan Sekjen PBB untuk Suriah, berulang kali menekankan peran konstruktif Iran dalam krisis Suriah dan dia juga kembali menyampaikan apresiasi kepada Iran atas peran dan diplomasinya menyukseskan gencatan senjata di Suriah.

Iran juga telah mengerahkan seluruh upayanya membantu pemberantasan terorisme, perwujudan gencatan senjata, percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan dialog komprehensif kubu Suriah dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal krisis Suriah Iran menekankan tiga prinsip utama yaitu, penghormatan terhadap tuntutan rakyat Suriah, penentangan intervensi asing, dan penolakan pemanfaatan terorisme sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik.

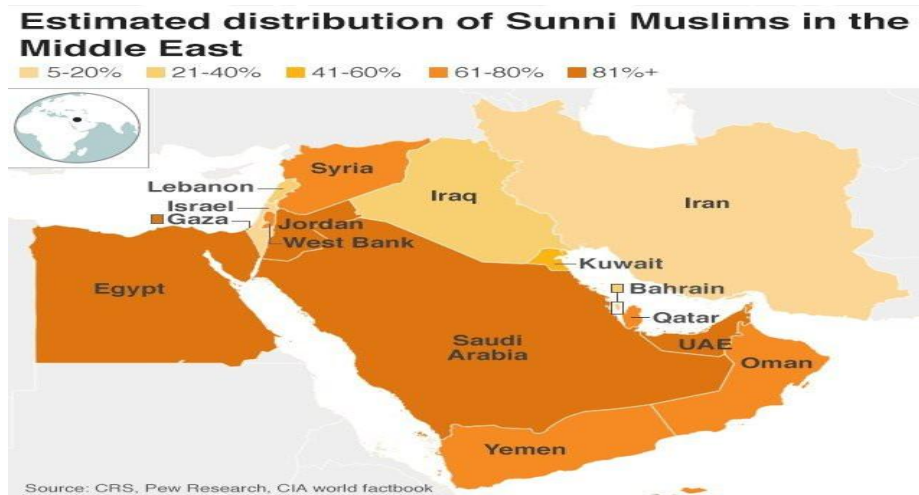
Sementara itu, Iran selalu memprioritaskan politik luar negeri yang berlandaskan pada peningkatan hubungan konstruktif berdasarkan kepentingan kolektif. Terkait transformasi politik di Irak, Iran juga menunjukkan kinerja berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas nasional negara itu, serta terhadap hak-hak seluruh kelompok di Irak dan Lebanon. Politik Iran adalah mendukung persatuan dan kekompakan negara-negara regional khususnya negara jiran. Lobi para pejabat Iran dan Irak dalam upaya mewujudkan persatuan kelompok-kelompok Irak, juga dalam rangka menyelesaikan krisis politik dan menjaga kedaulatan serta integritas Irak. Pada prosesnya, Iran juga tidak memperhatikan atau mengutamakan kelompok tertentu di Irak. Karena secara keseluruhan, Iran menilai keamanan Irak adalah ketenteraman bagi Republik Islam sebagai tetangga (Today, Pars Today, 2016).

2. Konstelasi Keamanan di Timur Tengah dan Usaha-usaha Arab Saudi Mendapatkan Pengaruh

Arab Saudi merupakan sebuah kerajaan serta rumah bagi tempat kelahiran Islam, dapat dilihat secara historis negara itu merupakan pemimpin dunia Muslim. Namun, pada tahun 1979 hal ini ditantang oleh revolusi Islam di Iran yang menciptakan tipe negara baru di kawasan itu yang bertujuan untuk memperkenalkan paham mereka kenegara-negara di kawasan Timur Tengah.

Arab Saudi dan Iran terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseteruan puluhan tahun di antara mereka semakin memanas dikarenakan oleh perbedaan paham dalam agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam. Arab Saudi menganggap negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka sementara itu sebagian besar masyarakat Iran adalah Muslim Syiah.

Gambar 4.1 (BBC, 2017)



Gambar diatas merupakan perbedaan pengaruh Arab Saudi dan Iran di wilayah Timur tengah. Arab Saudi berusaha mati-matian menahan pengaruh Iran yang meningkat dengan usaha militeristik Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang merupakan penguasa de facto di negara tersebut.

Dia melancarkan perang melawan pemberontak di negara tetangga Arab Saudi di bagian selatan, Yaman, untuk menahan pengaruh Iran yang dirasakan di sana, namun setelah hampir tiga tahun, perang ini terbukti sebagai sebuah pertarungan yang mahal.

Sementara di Lebanon, banyak pengamat percaya Saudi memberi tekanan ke perdana menteriya untuk mengundurkan diri guna merusak kestabilan negara sekutu Iran, basis

kelompok milisi Syiah Hizbullah, mengarah ke blok yang memiliki kekuatan politik dan mengendalikan sebuah pasukan tempur bersenjata berat.

Ada juga kekuatan eksternal yang bermain. Arab Saudi didukung oleh administrasi Trump juga mendukung upaya Saudi untuk menahan Iran. Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah dua negara yang paling tegas menolak perjanjian internasional pada 2015 yang membatasi program nuklir Iran, bersikeras bahwa hal itu tidak cukup untuk menutup kemungkinan Iran menciptakan bom nuklirnya (BBC, 2017, hal. 1).

Baik Saudi maupun Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan pengaruh Iran di Timur Tengah. Saudi pun telah terang-terangan menyebut kesepakatan nuklir Iran sebagai kesepakatan yang salah. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penjualan senjata besar-besaran bernilai 110 miliar dollar kepada Arab Saudi dalam kunjungannya yang pertama ke luar negeri sejak menjadi presiden. Kunjungan ini merupakan pernyataan terbuka kepada Iran tentang komitmen Washington kepada Arab Saudi sebagai pusat kekuatan regional (staff, 2017, hal. 1).

Arab Saudi dan Iran sama-sama memiliki pengaruh yang kuat di kawasan timur tengah, hal ini sebagian besar didasari oleh latar belakang kepercayaan negara-negara Timur Tengah yang memang terbagi dua yaitu Sunni dan Syiah. Negara yang pro terhadap Arab Saudi yaitu Mesir, Yaman, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar dan Bahrain. Sementara Irak, Suriah, Lebanon dan Palestina berada di pihak Iran (Shaheen, 2018)

KESIMPULAN

Kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut, yang berdasar kepada kebutuhan suatu negara akan kesejahteraan bagi pemerintah nasional dalam level internasional. Arab Saudi yang notabennya merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh yang besar di kawasan Timur Tengah, merasa terancam

dengan munculnya Iran yang menjadi penantang rezim Arab Saudi. Konflik antara Arab Saudi dan Iran yang sebenarnya merupakan masalah klasik perbedaan paham dalam agama Islam yang telah mengakar sejak dulu. Arab Saudi yang menganut paham Sunni menganggap merekalah yang paling benar, sedangkan Iran dengan paham Syiahnya juga merasa benar, sehingga konflik ini sudah mendarah daging. Iran yang mulai memunculkan pengaruhnya sejak revolusi Iran di tahun 1979 mencoba untuk menyebarkan paham Syiahnya ke negara-negara tetangga.

Persaingan kedua negara ini dalam memperebutkan pengaruh juga semakin terlihat jelas setelah *The Arab Spring*. Arab Saudi dan Iran mengambil keputusan yang berbeda menyikapi peristiwa politik tersebut, dalam gejolak politik Suriah yang masih berlangsung hingga sampai saat ini, Iran mendukung penuh Rezim Bashar al-Assad. Sikap politik Iran dengan dukungannya untuk Rezim Assad ini karena Suriah telah menjadi salah satu koalisi Iran di Timur Tengah sejak revolusi Iran 1979, terlebih Assad adalah pemimpin dari kalangan Syiah. Oleh karena itu Iran mempunyai kepentingan politik untuk menjaga dan mempertahankan mitra politiknya. Sebaliknya Saudi memberi dukungan bagi kelompok oposisi di Suriah yang bermaksud menggulingkan Assad dari kursi kepresidenan di Suriah. Target Saudi adalah menggulingkan pemimpin dari kelompok Syiah tersebut dan kemudian menggantinya dengan pemimpin dari aliran Sunni, mengingat Suriah adalah negara dengan mayoritas penduduk beraliran Sunni tetapi dipimpin oleh Assad yang menganut paham Syiah. Tidak hanya itu, Iran juga meningkatkan kekuatan militernya dengan memperbanyak produksi senjata dalam negeri, yang menjadikan kekuatan militer Iran berada diatas Arab Saudi.

Melihat hal tersebut, Arab Saudi merasa tersaingi serta terancam akan posisinya di Timur Tengah. Arab Saudi yang merupakan sahabat dari Amerika Serikat menggunakan anggaran negaranya untuk belanja senjata kepada negara adidaya tersebut. Amerika yang

telah menjadi pemasok senjata Arab Saudi sejak dulu menyambut baik keputusan Arab Saudi untuk membeli senjata secara besar-besaran ke Amerika Serikat. Kesepakatan ini bernilai \$ 110 miliar yang menjadi kesepakatan tunggal senjata terbesar dalam abad ini. Pembelian senjata ini juga dilakukan Arab Saudi agar meminimalisir serta menjadi kekuatan penangkal agar Iran tidak akan melakukan serangan langsung kepada Arab Saudi.

Usaha-usaha Arab Saudi untuk mengimbangi atau bahkan menandingi militer Iran ini sangat didukung oleh Amerika Serikat yang juga merasa terancam akan pengaruh Iran di Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran bersama-sama mengecahkan program pengembangan nuklir di Iran, yang mereka waspadai Iran tidak hanya menggunakan nuklir sebagai kebutuhan listrik melainkan mengembangkan senjata pemusnah massal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Tim Dunne & Brian C. Schmidt. (2001). *The Globalization of World Politics*. New York: oxford university Press.

James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff. (1997). *Contending Theories of International Relations*. new york: Addison-Wesley Educational Publisher, Inc.

Rachmawati, I. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Robert Jackson dan Georg Sorensen. (2005). *pengantar ilmu hubungan internasional*. yogyakarta: pustaka pelajar.

Rourke, J. T. (1988). *International Politics on the World Stage*. california: Cole Publishing Company.

Sahide, A. (2017). *Gejolak Politik Timur Tengah*. Yogyakarta: The Phinisi Press

Yogyakarta. Akbar, H. (Komponis). (2014). *Kuliah Hubungan Internasional*. [B. Wardhani, Pemain] Surabaya, Surabaya, Indonesia.

Akbar, H. (2014, Maret 18). *UNAIR*. Diambil kembali dari web.unair.ac.id: [http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94111-\(SOH201\)%20Teori%20Hubungan%20Internasional-Perspektif%20Realisme%20dalam%20Teori%20Hubungan%20Internasional.html](http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94111-(SOH201)%20Teori%20Hubungan%20Internasional-Perspektif%20Realisme%20dalam%20Teori%20Hubungan%20Internasional.html)

bangsa, o. (2017, mei 21). *opini bangsa*. Diambil kembali dari opini bangsa.com: <http://www.opinibangsa.id/2017/05/arab-saudi-beli-senjata-senilai-1452.html>

BBC. (2017, November 18). *Tempo.co*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/bbc/345/apa-yang-melatarbelakangi-perselisihan-arab-saudi-dan-iran>

Bokhari, K. (2017). *The US-Saudi Alliance. The two countries need each other, but their interests are diverging.* , 1.

Dougherty dan Pfaltzgraff. (1997). *Contending Theories of International Relations*. new york: Addison-Wesley Educational Publisher, Inc.

Dunne & Schmidt. (2001). *The Globalization of World Politics*. New York: oxford university Press.

El-Gogary, A. (2006). *The Nuclear Savior Of Tehran*. Depok: Pustaka IIMaN.

Fadel. (2017, mei 21). *Penjualan Senjata Terbesar AS-Saudi Dilakukan Saat Saudi Lakukan Kejahatan Perang Atas Yaman*. Dipetik April 1, 2018, dari Liputan Islam.com: <http://liputanislam.com/internasional/penjualan-senjata-terbesar-as-saudi-dilakukan-saat-saudi-lakukan-kejahatan-perang-atas-yaman/>

Fuadi, I. (2017, November 15). *Begini Kekuatan Militer Arab Saudi dan Iran Jika Keduanya Berperang*. Dipetik Maret 28, 2018, dari Kiblat: <https://www.kiblat.net/2017/11/15/begini-kekuatan-militer-arab-saudi-dan-iran-jika-keduanya-berperang/>

Greater, J. (2017, may 06). *jakarta greater*. Diambil kembali dari jakarta greater national interest: <https://jakartagreater.com/arab-saudi-borong-alutsista-as-termasuk-thaad/>

Jackson dan Sorensen. (2005). *pengantar ilmu hubungan internasional*. yogyakarta: pustaka pelajar.

kamil, m. (2017, juni 09). *klik anggaran-opini*. Diambil kembali dari klik anggaran: <http://www.klikanggaran.com/opini/arab-dan-qatar-pelanggan-besar-amerika-serikat.html>

Khan, S. M. (2007). *Ahmadinejad, The Lion From Aradan*. Bandung: Mizan Media Utama.

Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Mehta, A. (2017, juni 8). *Revealed: Trump's \$110 billion weapons list for the Saudis*. Dipetik Maret 12, 2018, dari Defense News: <https://www.defensenews.com/breaking-news/2017/06/08/revealed-trump-s-110-billion-weapons-list-for-the-saudis/>

Moussaoui, E. (2014, januari 24). *DW*. Diambil kembali dari DW web site: <http://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172>

Muslim, Y. (2016, April 18). *Kiblat Net/Home/In Depth*. Diambil kembali dari Kiblat Net web Site: <https://www.kiblat.net/2016/04/18/hubungan-kuat-saudi-berbeda-tapi-saling-membutuhkan/>

- Nirmala, R. (2017, Maret 15). *Beritagar/Beranda/Berita*. Diambil kembali dari Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/merajut-ulang-hubungan-as-dan-arab-saudi>
- Omar, M. (2017). The Special Partnership: Considering U.S.-Saudi Relations Through the Alliance Politics Literature. *geo political futures* , 42-43.
- Pike, J. (2017, maret 16). *Saudi Arabia - Foreign Policy*. Dipetik april 23, 2018, dari globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-forrel.htm>
- Power, G. F. (2017, februari 17). *Global Fire Power*. Dipetik maret 19, 2018, dari Global Fire Power.com: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iran
- Rachmawati, I. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rahman, M. A. (2003). *Iran Pasca Revolusi*. Jakarta: Kompas.
- Rourke, J. T. (1988). *International Politics on the World Stage*. California: Cole Publishing Company.
- Rucker and DeYoung. (2017, mei 20). *Trump signs 'tremendous' deals with Saudi Arabia on his first day overseas*. Dipetik april 3, 2018, dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/politics/trump-gets-elaborate-welcome-in-saudi-arabia-embarking-on-first-foreign-trip/2017/05/20/679f2766-3d1d-11e7-a058-ddbb23c75d82_story.html?utm_term=.24a9c96aeb1f
- Sahide, A. (2017). *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Sahide, A. (2017). *Gejolak Politik Timur Tengah*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Sari, P. R. (2013). PENJUALAN SENJATA MILITER AMERIKA SERIKAT KE ARAB SAUDI. *Digital Repository Universitas Jember Copyright ©2017* , 1.
- Shaheen, K. (2018, januari 04). *Saudi Arabia and Iran's rivalry is key to the Middle East in 2018*. Dipetik April 23, 2018, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/04/2018-saudi-arabia-iran-rivalry-key-middle-east-year-ahead>
- Staff, M. E. (2015, march sunday). *Middle East Eye*. Diambil kembali dari Middle East Eye: <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-becomes-worlds-biggest-importer-arms-1761403816>
- staff, V. (2017, Mei 24). *Penjualan Senjata AS ke Saudi dan Dampaknya pada Perdamaian di Timur Tengah*. Dipetik maret 27, 2018, dari VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-penjualan-senjata-as-ke-saudi-/3868436.html>
- Sugrue, M. (2010, Desember 5). *Saudi Arms Deal Moves Forward*. Dipetik April 3, 2018, dari Arms Control Association: https://www.armscontrol.org/act/2010_12/Saudi_Arms

Today, P. (2018, maret 22). *Kunjungan Putera Mahkota Saudi dan Penjualan Senjata AS*. Dipetik april 1, 2018, dari parstoday.com: http://parstoday.com/id/news/iran-i53746-kunjungan_putera_mahkota_saudi_dan_penjualan_senjata_as

Today, P. (2016, maret 9). *Pars Today*. Dipetik maret 19, 2018, dari Pars Today.com: http://parstoday.com/id/radio/iran-i3568-hubungan_iran_dan_negara_timur_tengah_dalam_setahun

Today, P. (2018, januari 7). *Pars today*. Dipetik maret 19, 2018, dari pars Today Web site: http://parstoday.com/id/radio/iran-i49403-peningkatan_kekuatan_militer_iran_di_tahun_2017

Webb, W. (2017). Trump Is Taking The US-Saudi Relationship To The Next Level. *vanderbilt.edu* , 1-3.

wibowo, h. (2011, maret 8). *makalah hubungan internasional*. Dipetik maret 19, 2018, dari makalah hubungan internasional blogspot.co.id: <http://makalahhubinternasional.blogspot.co.id/2011/01/posisi-iran-di-timur-tengah.html>

zahid. (2015, januari 28). *Catatan Kecil Sejarah Mesra Hubungan AS-Saudi*. Dipetik april 1, 2018, dari eramuslim.com: <https://www.erasmuslim.com/berita/sejarah-mesra-hubungan-amerika-serikat-arab-saudi.htm#.WsDWldRubIU>